

Jika kita menengok kembali aksi bela Islam yang telah lewat, pernahkah kita bertanya bagaimana bisa ribuan bahkan jutaan umat muslim berkumpul di satu titik dengan simbol dan semangat yang sama? Bagaimana bisa umat muslim yang tadinya sibuk dengan pekerjaan mereka sehari-hari berani mengambil cuti dan merelakan jauh-jauh pergi ke Ibu Kota untuk mengikuti aksi di jalan? Bagaimana pula, permasalahan yang tadinya lokal bagi warga Jakarta menjadi begitu meledak dengan framing penista agama yang dibumungkan? Dan dibalik itu semua, basis legitimasi apa yang sebenarnya melatarbelakangi aksi ini menjadi sangat heroik bagi kalangan umat muslim?

Secara singkat, tulisan ini akan membahas bagaimana basis legitimasi itu diciptakan sehingga aksi bela Islam dapat berjalan lancar dan diikuti oleh ribuan bahkan jutaan umat muslim.

Seperti yang kita ketahui, ketiga jilid aksi bela Islam yang terjadi dalam kurun waktu tertentu di Jakarta 2016 lalu dilatarbelakangi oleh pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyinggung salah satu ayat di dalam kitab suci Al Quran saat kunjungan kerjanya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu September 2016 lalu. Video rekaman yang beredar di dunia maya yang menampilkan potongan pembicaraan Ahok itu cepat beredar beberapa hari kemudian.

Walaupun video tersebut sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat akibat potongan video yang dimanipulasi, hal itu tidak membuat umat muslim yang sejak dulu menunggu waktu yang tepat untuk menyerang petahana patah arang. Momentum atas puncak kekecewaan terhadap Ahok dimanfaatkan dengan baik ormas Islam gadangan Habib Rizieq dengan menyebut sang petahana telah melecehkan dan menista agama Islam. Hal inipun diikuti dengan pelaporan Ahok ke meja Hijau beberapa hari setelahnya.

Walaupun dulu banyak yang kontra terhadap sikap ormas FPI pimpinan Habieb Rizieq itu, momentum penistaan agama oleh Ahok dimanfaatkan dengan baik dengan menggandeng beberapa ulama yang sepakat dengan sikap FPI seperti ustadz Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Bachtiar Nasir, Aa Gym, dan Syekh Ali Jaber. Dilain pihak, MUI juga mengeluarkan pernyataan sikap penghinaan agama yang dilakukan Ahok dan GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI) pimpinan Ustadz Bachtiar Nasir mulai berkoalisi dengan FPI secara personal yang diikuti kemudian dengan lembaga

mereka. Pada akhirnya, stigma bahwa Ahok adalah penista agama diterima masyarakat luas bahkan yang dulunya tidak tahu menahu juga ikut membuat tagar #AdiliAhok dan #PenjarakanAhok di media sosial.

Strategi ini berhasil dimanfaatkan FPI memupuk legitimasi dari masyarakat luas, bahkan yang di luar Jakarta melalui media sosial hingga akhirnya mereka menyiarkan seruan aksi 4 November 2016. Walaupun aksi itu sempat berakhir bentrok, FPI berhasil meng-*counter* dengan membeberkan bukti bahwa massa aksi yang melakukan penyerangan bukan dari pihak mereka.

Pada seruan aksi selanjutnya, sempat terjadi keraguan berapa jumlah massa aksi yang mau ikut dalam seruan aksi berikutnya. Namun, FPI berhasil meyakinkan umat muslim bahwa pelecehan terhadap agama harus diadili. Dengan mengatur strategi aksi baru menjadi do'a untuk bangsa di Monas dengan menggandeng ustadz terkenal dan para artis simpatisan tanah air, aksi bela Islam Jilid 3 meledak dengan jumlah peserta aksi 5-7 juta umat muslim.

Penutup:

Dari hal ini kita dapat memahami bahwa basis legitimasi yang dimiliki oleh para kreator aksi didapatkan dari adanya kesamaan nasib dengan umat muslim lainnya yang agamanya telah dinodakan oleh orang lain. Disisi lain, legitimasi secara formal didapatkan dari segi hukum yaitu UU KUHP ayat 156 dan 156a tentang kasus penodaan agama dan jaminan bagi warga negara untuk bisa melakukan demonstrasi. Namun, legitimasi yang dimiliki oleh para kreator aksi tidaklah didukung oleh semua umat Islam. Masih banyak umat Islam yang tidak menyepakati aksi tersebut karena berbagai hal, salah satunya yaitu rawan terjadi unsur politis dan pernyataan Ahok tersebut tidak bisa digolongkan sebagai kalimat penistaan Agama. Inilah yang menarik, karena basis legitimasi yang pro dan kontra terhadap aksi diproduksi dengan cara berbeda, studi tentang saluran ekstra parlementer seakan tidak pernah kehabisan bahan kajian.